



EDISI JUMAT 20 FEBRUARI 2026

H A R I A N

LENTER

Inspirasi Perubahan

03

POLITIC
Belum Genap 6 Bulan Disanksi, Sahroni Kembali Duduki Kursi Pimpinan Komisi III DPR RI

04

NUSANTARA
Disepakati! Perpanjangan Izin Tambang Freeport Indonesia Usai 2041

10

LISTSTYLE
Tips Make Up Anti-Crack dan Tetap Flawless Sehari-hari

Duka di Nunukan: Pelita Air Jatuh dalam Misi BBM Perbatasan

Pesawat kargo Pelita Air Service jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA yang melayani distribusi BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan jatuh dalam penerbangan rute Long Bawan-Tarakan, Kamis (19/2/2026). Kecelakaan ini mengakibatkan pilot Capt. Hendrick Lodewyck Adam meninggal dunia. Insiden disebut terjadi usai lepas landas dari Bandara Long Bawan setelah sempat memancarkan sinyal darurat ELT. Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi otoritas terkait. Baca berita lengkap di Hal.2. (HO/Pendam VI/Mulawarman)

KINI BPJS KESEHATAN DIKOMANDANI PURNAWIRAWAN TNI

Penonaktifan massal peserta bantuan iuran (PBI), rencana kenaikan iuran pada 2026, hingga penghapusan sistem kelas menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di tengah kegaduhan tersebut, Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan periode 2026-2031. Jabatan tersebut resmi diamanahkan mulai 19 Februari 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Diketahui, Ali Ghufron Mukti telah menjabat sebagai Dirut sejak 2021. Masa jabatannya berakhir pada Februari 2026. Polemik penonaktifan 11 juta peserta PBI diperkirakan menjadi salah satu tugas besar jajaran pengelola baru. Tak hanya itu, dalam keputusan tersebut juga diangkat tujuh anggota dewan pengawas (dewas) dan direksi. Proses seleksi Direksi BPJS Kesehatan sebelumnya juga menuai kontroversi. Panitia Seleksi (Pansel) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Januari 2026. Para penggugat meminta majelis hakim memerintahkan pansel menunda proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2026-2031. Perkembangan terbaru, perkara dengan nomor PTUN.JKT-05012026M53 belum diputus dan masih dalam proses persidangan per Januari 2026. Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan gugatan memenuhi syarat untuk dilanjutkan. **BACA HAL 11...**

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN

DIREKSI BPJS KESEHATAN PERIODE 2026-2031

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 2026-2031

- Stevanus Adrianto Passat - Ketua Dewan Pengawas (unsur pekerja)
- Murti Utami Adyanto - Anggota Dewan Pengawas (unsur pemerintah)
- Rukijo - Anggota Dewan Pengawas (unsur pemerintah)
- Afif Johan - Anggota Dewan Pengawas (unsur pekerja)
- Paulus Agung Pambudhi - Anggota Dewan Pengawas (unsur pemberi kerja)
- Sunarto - Anggota Dewan Pengawas (unsur pemberi kerja)
- Lula Kamal - Anggota Dewan Pengawas (unsur tokoh masyarakat)

Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031

- | | |
|--|--|
| ○ Prihati Pujowaskito - Direktur Utama | ○ Fatih Waluyo Wahid - Direktur |
| ○ Abdi Kurniawan Purba - Direktur | ○ Setiaji - Direktur |
| ○ Akmal Budi Yulianto - Direktur | ○ Vetty Yulianti Permasnari - Direktur |
| ○ Bayu Teja Muliawan - Direktur | ○ Sutopo Patria Jati - Direktur |

PROFIL PRIHATI PUJOWASKITO

Identitas Utama

- **Nama:**
Mayjen TNI (Purn.) dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA.
- **Status:**
Resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto (19 Februari 2026).
- **Asal:**
Solo, Jawa Tengah.

Rekam Jejak Karier (Militer & Medis)

- **Eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto:**
Memimpin salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia.
- **Eks Dekan FKIK Unhan:**
Memimpin Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan.
- **Kopassus:**
Memiliki pengalaman lapangan sebagai dokter di satuan elit TNI AD.

Keahlian & Kualifikasi

- **Spesialis:**
Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiologi).
- **Gelar:**
Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) — Bintang Dua.
- **Keahlian Khusus:**
Konsultan penyakit jantung dan pembuluh darah



PESAWAT PELITA AIR JATUH DI NUNUKAN

Pilot Meninggal Dunia, Sinyal Bahaya Tertangkap di Udara

Sinyal bahaya itu pertama kali tertangkap di udara—bukan dari menara, melainkan dari kokpit pesawat lain yang kebetulan melintas. Sebuah penerbangan milik Susi Air PK-BVN yang berada di sekitar Long Bawan menerima pancaran Emergency Locator Transmitter (ELT) dari arah ujung landasan, beberapa menit setelah pesawat kargo milik Pelita Air Service jatuh di perbukitan wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). Dari titik itulah rangkaian peristiwa yang singkat namun mematikan terjadi. Pesawat yang baru saja lepas landas terlihat menurun dalam posisi miring dan beberapa waktu kemudian jatuh dengan kondisi diselimuti api.

Pesawat tipe Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA itu menjalankan misi pengantaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional PT Pertamina (Persero) di wilayah perbatasan. Menurut Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, pesawat berangkat dari Tarakan pada pukul 10.15 WITA dan mendarat di Long Bawan pada pukul 11.10 WITA.

“Setelah menyelesaikan misi pengantaran logistik, pesawat kembali lepas landas dari Bandara Yuvai Semaring Long Bawan pada pukul 12.10 WITA dalam kondisi kosong atau tanpa muatan BBM, hanya membawa satu orang pilot,” ujar Agung. Ia menambahkan, “Sekitar pukul 12.20 WITA, pesawat dilaporkan mengalami kecelakaan di



Jenazah ilot pesawat PT Pelita Air Service yang jatuh di wilayah pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur berhasil dievakuasi personel TNI dari Kodam VI Mulawarman, Kamis (19/2/2026). Medan yang sulit dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi personel. (HO/Pendam VI Mulawarman)

kawasan pegunungan Pabetung Remayo.”

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril, menggambarkan detik-detik sebelum kecelakaan berdasarkan

keterangan saksi di apron. “Pukul 12.25 WIT petaka terjadi. Saksi mata di apron (area parkir pesawat) melihat pesawat tersebut turun dalam keadaan miring ke arah belakang bukit

Kemenhub Pastikan Laik Terbang

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) memastikan pesawat charter milik Pelita Air Service yang jatuh di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan armada khusus pengangkut bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah terpencil dan dinyatakan dalam kondisi laik terbang sebelum insiden terjadi. Pesawat tersebut berjenis Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laiza mengungkapkan pesawat itu diproduksi pada 2013 dengan nomor seri 802-0494. Armada tersebut dioperasikan untuk mendukung distribusi energi ke wilayah perbatasan dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Pesawat jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA tahun pembuatan 2013, nomor seri 802-0494, yang dioperasikan oleh Pelita Air Service khusus untuk pengangkutan BBM ke daerah terpencil,” kata Lukman dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Pada hari kejadian, pesawat bertolak dari Bandar Udara Long

Bawan pukul 12.10 WITA dengan tujuan Tarakan. Muatan yang dibawa adalah BBM milik PT Pertamina (Persero) untuk mendukung operasional di wilayah perbatasan. Pesawat hanya diawaki satu orang kru, yakni pilot Capt. Hendrick Lodewyck Adam. Berdasarkan rencana penerbangan, pesawat dijadwalkan tiba di Tarakan pada pukul 13.15 WITA.

Pilot sempat melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara (ATC) Tarakan bahwa ia memperkirakan akan melintas di wilayah udara Malinau pada pukul 12.24 WITA.

Namun sebelum laporan posisi tersebut terkonfirmasi, pada pukul 12.20 WITA pesawat memancarkan sinyal darurat Emergency Locator Transmitter (ELT), yang umumnya aktif secara otomatis ketika terjadi benturan keras atau kondisi darurat.

Beberapa jam kemudian, kabar duka dipastikan. “Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia,” ujar Lukman. Pilot

menjadi satu-satunya korban dalam kecelakaan tersebut.

Dari sisi teknis, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pesawat telah menjalani prosedur perawatan berkala. Pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam terakhir dilakukan pada 11 Februari 2026.

“Dari sisi kelaikudaraan, pesawat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026. Total pemeriksaan jam terbang pesawat mencapai 3.303 jam,” tutur Lukman.

Data tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis pesawat memenuhi persyaratan operasional sebelum terbang.

Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan belum dapat disimpulkan. Otoritas penerbangan masih melakukan investigasi untuk menelusuri faktor-faktor yang berkontribusi terhadap insiden tersebut, baik dari sisi teknis, operasional, maupun kondisi lingkungan saat penerbangan berlangsung. (ant,ist/dya)

BEBERAPA KECELAKAAN PESAWAT DI INDONESIA (HINGGA FEBRUARI 2026)

- Pelita Air PK-PAA (19 Februari 2026):**
Pesawat kargo yang mengangkut BBM jatuh di kawasan perbukitan Long Bawan, Krayan Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.33 WITA ini mengakibatkan pilot pesawat meninggal dunia.
- Indonesia Air Transport (IAT) ATR 42-500 (17 Januari 2026):**
Pesawat ini menabrak Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya dinyatakan hilang kontak dalam penerbangan menuju Makassar. Investigasi awal menduga adanya kesalahan prosedur navigasi di tengah cuaca buruk.
- Helikopter BK117 D3 (1 September 2025):**
Jatuh di kawasan hutan lereng Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Seluruh 8 orang di dalamnya (2 awak dan 6 penumpang) dilaporkan tewas.
- Insiden Wings Air (Tanjung Karang - Halim):**
Pesawat ATR 72-500 menabrak peralatan penanganan darat (towing tractor) di landasan pacu Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang menyebabkan pembatalan penerbangan.

di ujung landasan 22,” ujarnya.

Pesawat rute Long Bawan-Tarakan itu jatuh sesaat setelah lepas landas. Beberapa menit kemudian, tanda darurat muncul di langit yang sama. “Pukul 12.27 WIT, pesawat Susi Air yang sedang mengudara di sekitar lokasi menangkap sinyal ELT dari arah ujung landasan,” kata Syahril.

Sinyal tersebut umumnya memancar otomatis ketika pesawat mengalami benturan keras. Informasi itu menjadi penanda awal bagi tim di darat untuk mempersempit pencarian. Kondisi cuaca, menurut Syahril, relatif tidak ekstrem.

“Jarak pandang masih cukup aman untuk penerbangan. Jarak pandangnya sejauh 6 kilometer,” ujarnya. Ia menambahkan, “Angin bertiup dari arah 240 derajat dengan kecepatan sangat pelan, 2 knot,” sementara hujan ringan tercatat turun di kawasan itu.

Pada pukul 13.25 WIT, tim gabungan yang terdiri dari personel TNI AU, Koramil, dan masyarakat setempat menemukan titik jatuh pesawat. Pencarian dilanjutkan oleh unsur Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonarmed 4/Prh bersama Kodim Nunukan. Sebanyak 21 personel diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pengamanan area. (ant,kum,ist/dya)

BELUM GENAP 6 BULAN DISANKSI, SAHRONI KEMBALI DUDUKI KURSI PIMPINAN KOMISI III DPR RI

Penetapan dilakukan dalam rapat Komisi III di kompleks parlemen, Jakarta, dipimpin Wakil Ketua Komisi III Sufmi Dasco Ahmad. Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu, yang sebelumnya mengisi kursi pimpinan komisi tersebut sebelum keluar dari Partai

Pelantikan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI pada Kamis (19/2/2026) menimbulkan pertanyaan publik karena dilakukan sebelum genap enam bulan sejak ia dijatuhi sanksi nonaktif sebagai anggota DPR. Pimpinan parlemen menegaskan, keputusan itu semata-mata mengikuti putusan lembaga etik internal.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama Ahmad Sahroni dan jajaran pimpinan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026). (Dok-DPR)

FAKTA TERKAIT PERNYATAAN KONTROVERSIAL AHMAD SAHRONI

○ Pernyataan "Orang Tolol Sedunia" (Agustus 2025)

Ahmad Sahroni menyebut pihak yang meminta DPR dibubarkan sebagai "orang paling tolol sedunia", merespons tuntutan pembubaran DPR terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.

○ Klarifikasi

Ia menjelaskan di Kompas.com bahwa kata "tolol" ditujukan pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa dibubarkan begitu saja, bukan kepada masyarakat atau pendemo.

○ Penjarahan Rumah

Rumah Sahroni di Tanjung Priok digerus massa: terjadi perusakan, pelemparan batu, dan penjarahan (termasuk patung Iron Man). Rumah Eko Patrio dan Uya Kuya juga terdampak dalam kerusuhan yang sama.

○ Sanksi & Pemulihan Jabatan

Sahroni dinonaktifkan 6 bulan dari pimpinan Komisi III DPR. Per 19 Februari 2026, ia kembali menjabat Wakil Ketua Komisi III menggantikan Rusdi Masse.



PENGADILAN Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis penjara terhadap pasangan suami-istri yang dinilai berperan menghasut penjarahan rumah politikus Ahmad Sahroni. Keduanya, Sayful Bahri dan Gita, divonis masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang yang digelar Kamis (19/2/2026).

Sidang berlangsung di ruang utama pengadilan sekitar pukul 13.30 WIB. Selain pasangan tersebut, seorang terdakwa lain, Mohammad Rizky Noorsakti, turut disidangkan dalam perkara yang sama. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menghasut publik untuk melakukan tindakan melawan hukum serta mendorong perlawanan terhadap otoritas yang sah.

"Menghukum para terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan," ujar ketua majelis hakim saat

NasDem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Dalam forum rapat, Sahroni menyampaikan pernyataan singkat bernada reflektif.

"Assalamualaikum selamat

berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya," ujarnya setelah ditetapkan kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III.

Ia juga menyampaikan apresiasi

Penghasut Penjarahan Divonis 1,5 Tahun

membacakan putusan.

Hakim menilai tindakan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sahroni sebagai korban. Namun, vonis dijatuhkan lebih ringan karena seluruh terdakwa belum pernah memiliki catatan pidana sebelumnya.

Dalam perkara ini, sejumlah terdakwa lain juga dijatuhi hukuman. Bhayu Septian, Galih Adityo Nugroho, Syarif Abdul Karim, Afrizal Fikri Irawan, Muhammad Yusuf, serta Suryana Wijaya Kusuma masing-masing divonis 10 bulan penjara.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Pada sidang tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta Sayful, Gita, dan Rizky dihukum 2 tahun 6 bulan penjara karena dianggap terbukti melakukan penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

Kasus ini berkaitan dengan peristiwa penjarahan rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 30 Agustus 2025. Perkara tersebut kemudian diproses hukum dan berujung pada putusan

pengadilan terhadap para pelaku yang terlibat.

Terpisah, Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi agenda pembacaan vonis perkara penjarahan rumahnya yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/2/2026). Ia menyatakan telah memaafkan para terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim.

Sahroni, yang baru kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan tidak menyimpan kepentingan pribadi maupun rasa dendam terhadap para pelaku. Ia juga tidak mengharapkan jenis hukuman tertentu dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Ia mengatakan telah memberi maaf dan memilih mengikuti proses hukum yang berjalan. Baginya, keputusan akhir merupakan kewenangan pengadilan dan harus dihormati.

Sahroni menilai jalannya perkara ini patut dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi sehingga mekanisme hukum harus dihargai.(wid,ist,ant/dya)

kepada lembaga etik DPR yang pernah menjatuhkan sanksi kepadanya. "Dan terima kasih untuk pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih," katanya.

Kembalinya Sahroni ke kursi pimpinan komisi terjadi ketika masa sanksi nonaktif enam bulan yang dijatuhkan pada November 2025 secara hitungan waktu belum sepenuhnya terlampaui.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR hanya menjalankan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

"Ah, saya... Itu kan kita sekali lagi, kita ngikutin apa yang menjadi putusan MKD saja. Jadi kalau misalnya pimpinan DPR sudah menetapkan, berarti kan di MKD sudah tidak masalah," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa surat usulan dari NasDem tertanggal 12 Februari 2026 yang menempatkan Sahroni kembali sebagai pimpinan Komisi III tidak menyalahi putusan lembaga etik. "Ya karena memang kita kan pasti ketika kirim surat, sudah ada ini dari MKD. Enggak mungkin misalnya kita ngirim surat tanpa ada... Menyalahi apa yang menjadi putusan MKD ya," kata Saan.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pimpinan DPR menilai tidak ada lagi hambatan etik bagi Sahroni untuk kembali aktif menjalankan tugasnya.

Kontroversi yang berujung sanksi bermula dari pernyataan Sahroni saat menanggapi desakan pembubaran DPR dalam kunjungan kerja di Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Agustus 2025. Dalam kesempatan itu ia menyebut seruan pembubaran DPR sebagai sikap keliru. "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujarnya saat itu.

Pernyataan tersebut kemudian dinilai melanggar kode etik anggota dewan dan berujung pada sanksi nonaktif enam bulan dari DPR yang dijatuhkan pada November 2025.(tin,ist,kcm/dya)

DISEPAKATI! PERPANJANGAN IZIN TAMBANG FREEPORT INDONESIA USAI 2041

Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah 2041. Skema perpanjangannya hingga umur cadangan sumber daya (life of resource). Apakah menguntungkan bagi Indonesia?

Melansir Reuters Kamis (19/2/2026), penandatanganan berlangsung di Washington, D.C. pada Rabu (18/2/2027) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

MoU tersebut diteken oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mewakili pemerintah Indonesia, President and CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Dalam forum bisnis Kamar Dagang Amerika Serikat, Chairman Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut membuka jalan bagi keberlanjutan operasi tambang Grasberg setelah berakhirnya izin saat ini pada 2041.

Presiden Prabowo menegaskan orientasi pemerintah terhadap penguatan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. "Kami berharap kehadiran Amerika bisa semakin kuat di ekonomi kami. Kami ingin perusahaan-perusahaan Amerika menjadi mitra strategis," ujarnya.

Ia menilai relasi ekonomi bilateral memiliki ruang ekspansi yang luas, ditopang stabilitas politik domestik, disiplin fiskal, serta komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola investasi. Pemerintah, kata dia, berupaya menghadirkan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif sebagai prasyarat investasi jangka panjang.

Dalam dokumen kesepahaman, pemerintah dan Freeport menyepakati perubahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memungkinkan perpanjangan operasi hingga seluruh cadangan sumber daya dimanfaatkan. Perpanjangan tersebut masih menunggu penerbitan IUPK yang telah diamendemen oleh pemerintah Indonesia.

Freeport menegaskan komitmen pengalihan tambahan 12 persen saham PTFI kepada pemerintah Indonesia pada 2041 tanpa biaya akuisisi saham. Namun, terdapat ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengganti biaya investasi yang manfaatnya berlaku setelah 2041 berdasarkan nilai buku. Perusahaan akan mempertahankan kepemilikan sebesar 48,76 persen hingga 2041 dan sekitar 37 persen mulai 2042.

Dalam keterangan tertulis, Richard Adkerson menekankan arti strategis kemitraan jangka panjang tersebut. "Kami menghargai kemitraan jangka



Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dengan Halliburton saat Bussines Summit Gala Iftar Dinner di Washington DC, AS, Rabu (18/2/2026). (ant)

panjang kami dengan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia dan Papua, serta rasa saling percaya yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Operasional Grasberg telah memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan selama enam dekade sejarahnya, dan perpanjangan ini akan memberikan

peluang untuk terus membangun nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ujarnya.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut kesepahaman tersebut sebagai langkah strategis untuk menjamin kesinambungan

produksi sekaligus memperluas basis cadangan melalui eksplorasi lanjutan.

"Dengan ini, keberlanjutan kontribusi kepada negara khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga melalui penerimaan negara yang diperkirakan sekitar USD 6 miliar atau Rp 90 triliun per tahun, termasuk sekitar Rp 14 triliun untuk pemerintah daerah, keberlanjutan sekitar 30 ribu tenaga kerja serta program pengembangan masyarakat sekitar Rp 2 triliun per tahun," katanya. (wid,ist,rls/dya)

FAKTA-FAKTA TERBARU PT FREEPORT INDONESIA (PTFI)

Kepemilikan Saham

- 51,2% dimiliki Indonesia lewat MIND ID.
- 48,8% milik Freeport-McMoRan.
- Pemerintah memproses tambahan 10-12% saham → potensi naik jadi ±61-63%.

Produksi & Target 2026

- Emas: target 830.000 ons (±26 ton), turun dari 2025 (33 ton).
- Tembaga: target ±478.000 ton.
- Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave dijadwalkan pulih bertahap mulai Maret 2026.

Hilirisasi & Smelter Gresik

- Smelter single-line terbesar dunia di KEK JIPE Gresik, investasi ±Rp56 triliun.
- Target operasi penuh: Semester II-2026.

IUPK

- IUPK berlaku sampai 2041.
- Finalisasi perpanjangan hingga 2061 sebagai bagian dari skema tambahan saham 10%.



telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 12 persen menjadi bagian dari skema keberlanjutan kontribusi ekonomi. "MoU ini juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12% pada 2041," katanya. (wid,ist,kum/dya).

Insentif Investasi atau Pelemahan Posisi Tawar?

PERPANJANGAN hak operasi tambang di kawasan mineral Grasberg memasuki fase baru setelah pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan menyepakati nota kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar keberlanjutan operasi PT Freeport Indonesia hingga umur cadangan sumber daya.

Chairman Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson menegaskan bahwa kesepakatan tersebut memperpanjang kesinambungan operasi salah satu distrik tembaga dan emas terbesar di dunia sekaligus memperkuat kemitraan jangka panjang perusahaan dengan pemerintah Indonesia.

Dalam pernyataan tertulis, Richard menyampaikan, "Kami menghargai kemitraan jangka panjang kami dengan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia dan Papua, serta rasa saling percaya yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Operasional Grasberg telah memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan selama enam dekade sejarahnya, dan perpanjangan ini akan memberikan

peluang untuk terus membangun nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia."

Salah satu ketentuan utama adalah pengalihan tambahan 12 persen saham PTFI kepada pemerintah Indonesia pada 2041. Pengalihan dilakukan tanpa biaya akuisisi saham, namun pihak penerima wajib mengganti biaya investasi proporsional berdasarkan nilai buku atas investasi yang manfaatnya berlaku setelah 2041.

Dalam struktur kepemilikan yang disepakati, Freeport mempertahankan 48,76 persen saham hingga 2041 dan sekitar 37 persen mulai 2042.

Tony Wenas menyatakan MoU tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan operasi dan investasi jangka panjang. "Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang

Kasus TPPU Tambang Ilegal Rp25,8 Triliun

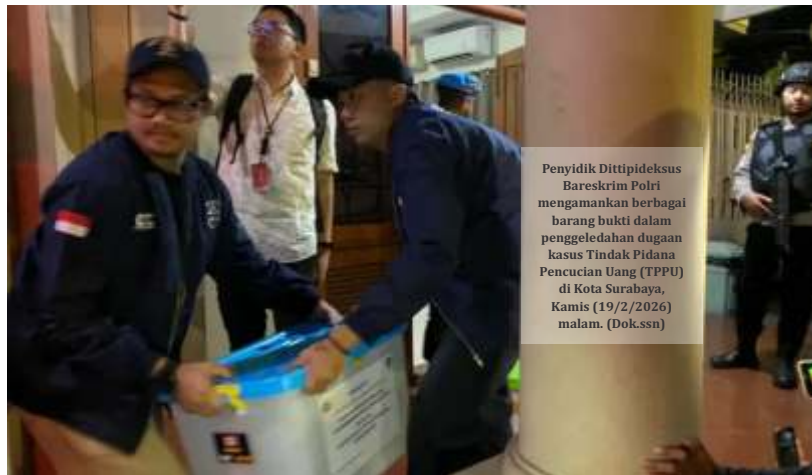
BARESKRIM GELEDAH TOKO-RUMAH DI JATIM, 4 KONTAINER UANG DAN BATANGAN EMAS DISITA

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Jawa Timur, Kamis (19/2/2026). Ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penggeledahan berlangsung di satu rumah di Jalan Tampomas, Surabaya, serta dua lokasi lain di Nganjuk yang terdiri atas sebuah toko emas dan satu rumah tinggal.

Langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan atas aktivitas jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal sepanjang 2019 hingga 2025. Berdasarkan temuan sementara penyidik, nilai akumulasi transaksi dalam perkara itu mencapai sekitar Rp25,8 triliun.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan dilakukan secara simultan sejak pagi hingga siang hari. Ia menegaskan bahwa tiga lokasi tersebut diduga memiliki keterkaitan langsung dengan rangkaian aktivitas pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi emas ilegal.

"Namun, yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung bahwa peng-geledahan masih dilakukan terhadap tiga tempat. Satu merupakan toko emas, yang dua adalah kediaman atau tempat tinggal.



Satu lokasi di Surabaya dan dua lokasi berada di Kabupaten Nganjuk," ujar Ade Safri kepada awak media, Kamis (19/2/2025).

Menurutnya, rumah yang digeledah di Surabaya disinyalir kuat berfungsi

sebagai tempat penampungan sekaligus lokasi peng-olahan emas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Dugaan tersebut didasarkan pada rangkaian temuan awal penyidik di lokasi. "Sementara ini penggeledahan yang

saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal," kata dia.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan praktik pencucian uang dari hasil tambang ilegal. Barang bukti itu meliputi dokumen administrasi, surat-surat transaksi, serta perangkat elektronik yang diduga menyimpan jejak aktivitas keuangan.

Tim penyidik Bareskrim Polri juh menyita empat kontainer berisi uang tunai, serta emas batangan dari hasil penggeledahan sebuah rumah di Jalan Tampomas, Kecamatan Sawahan, Surabaya tersebut.

Sejauh ini, kepolisian telah memeriksa 37 orang sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menelusuri rantai distribusi emas ilegal sekaligus memetakan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan maupun perputaran dana hasil aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan," ujar Ade Safri. Ia menegaskan, aparat tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat, baik dalam praktik pencucian uang maupun kegiatan pertambangan ilegal. Penegakan hukum, menurut dia, dilakukan tidak hanya dalam konteks penindakan pidana, tetapi juga sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pencegahan kerugian negara. (gus,ist,ssn/dya)

KPK PERPANJANG PENCEKALAN GUS YAQUT TERKAIT KORUPSI HAJI

Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz. Perpanjangan pencegahan itu berlaku selama enam bulan hingga 12 Agustus 2026.

Dua tersangka yang dikenai pencegahan adalah mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah serta Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, Ishfah Abidal Aziz.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kebijakan tersebut diambil karena proses penyidikan masih berlangsung. "Perpanjangan cegah ke luar negeri ini dibutuhkan karena proses penyidikan masih berlangsung," ujarnya, Kamis (19/2/2026).

Ia menegaskan perpanjangan tersebut berlaku sampai pertengahan Agustus 2026. "Betul, sampai 12 Agustus 2026," kata Budi.

Permintaan pencegahan diajukan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari proses hukum perkara dugaan korupsi

terkait kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dalam kasus yang sama, satu nama lain, yakni pemilik biro perjalanan Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur, tidak lagi masuk dalam daftar pencegahan sehingga dapat bepergian ke luar negeri.

KPK telah menetapkan Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, namun hingga kini keduanya belum dilakukan penahanan. Penyidikan masih berfokus pada pengumpulan alat bukti serta penghitungan kerugian negara.

Dalam proses tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan masih melakukan audit untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara. Pemeriksaan saksi turut dilakukan untuk kepentingan perhitungan tersebut, termasuk terhadap Yaqut.

Selain itu, Yaqut mengajukan permohonan praperadilan ke



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan dijadwalkan disidangkan perdana pada 24 Februari 2026.

Dalam tahap penyidikan berjalan,

KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah aparat sipil negara Kementerian Agama di Depok, serta ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. (gus,ini,ist/dya)

Imunisasi Campak Capai 94,4%, Kota Malang Kejar Ambang Minimal 95%

MALANG- Pelaksanaan imunisasi massal campak di Kota Malang mencapai 94,4 persen dari total sasaran. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang pun mengintensifkan strategi jemput bola. Hal ini dilakukan untuk mengejar ambang minimal 95 persen guna membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan Outbreak Response Immunization (ORI) campak dilaksanakan pada 2-13 Februari 2026 dengan menyasar 23.111 anak usia sembilan bulan hingga 13 tahun.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.826 anak telah menerima imunisasi. Artinya sudah mencapai 94,4 persen," ujar Husnul, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (19/2/2026).

Diakuinya, capaian tersebut memang belum sepenuhnya menyentuh angka 95 persen yang secara epidemiologis dibutuhkan untuk membentuk kekebalan kelompok. Meski selisihnya tipis, Dinkes menilai perlu ada langkah lanjutan agar target minimal tersebut dapat terpenuhi.

Untuk itu, Husnul menegaskan pihaknya akan melakukan sweeping dan kunjungan rumah kepada anak-anak yang belum menerima vaksin. Strategi ini dilakukan secara aktif oleh petugas kesehatan di wilayah sasaran.

"Kami lakukan sweeping dan kunjungan rumah untuk sasaran anak-anak yang belum tervaksin," tegasnya.

Langkah jemput bola tersebut, lanjut Husnul, akan dimaksimalkan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh anak yang masuk dalam target bisa terlayani. Upaya ini menjadi bagian dari respons cepat pemerintah daerah dalam mencegah potensi penularan lanjutan campak. "Sejak selesai ORI, satu-dua minggu ini kami maksimalkan," tegasnya.

Lebih lanjut, menurut Husnul pelaksanaan ORI campak sendiri tidak memandang status imunisasi sebelumnya, termasuk apakah anak telah menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) atau belum. Seluruh anak dalam rentang usia yang ditentukan tetap menjadi sasaran.

Menurut Husnul, selain untuk menghentikan penularan, imunisasi massal ini juga bertujuan mencegah dampak lanjutan campak yang dapat

berujung pada komplikasi serius. Hingga berpotensi terjadinya kasus fatal yang mengancam keselamatan anak.

ORI campak di Kota Malang, kata Husnul, difokuskan pada 2 wilayah kerja puskesmas, yakni Puskesmas Janti dan Puskesmas Kedungkandang. Kebijakan ini diambil berdasarkan temuan kasus campak di 2 kecamatan, yaitu Kedungkandang dan Sukun.

Di wilayah Puskesmas Janti, menurutnya capaian imunisasi telah mencapai 95,8 persen. Wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Bandungrejosari, Tanjungrejosari, dan Sukun di Kecamatan Sukun.

Sementara itu, Puskesmas Kedungkandang mencatat capaian 92,86 persen. Dengan wilayah pelaksanaannya mencakup Kelurahan

Ilustrasi: Pelaksanaan imunisasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) Campak menyasar anak usia 9 bulan-13 tahun di Kota Malang. (dok. Dinkes Kota Malang)



Kota Lama, Kedungkandang, Buring, dan Wonokoyo.

"Pelaksanaan ORI ini merupakan tindak lanjut atas temuan kasus campak sepanjang 2025. Berdasarkan data kami, terdapat sekitar 300 kasus suspek campak yang tersebar di lima kecamatan," kata Husnul. (Santi/Dya)

357 Ribu Warga Kabupaten Malang Belum Terlayani MBG



Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, meninjau salah satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kepanjen. (dok. DKP Kabupaten Malang)

MALANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari total target 698.855 penerima manfaat, tercatat sebanyak 357.699 warga belum terlayani hingga pekan ketiga Februari 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menyampaikan hingga saat ini sudah berdiri 185 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebanyak 26 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Pembangunan SPPG terus dikebut untuk mendukung program MBG. Saat ini sudah berdiri 185 SPPG dan yang masih tahap pembangunan ada 26 SPPG," ujar Mahila, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, apabila seluruh pembangunan tersebut tuntas, total SPPG yang ada akan mencapai 211 unit. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 22 unit dari target 233 SPPG. Namun, Mahila menyebutkan tautan pengajuan sebagai mitra SPPG di Badan Gizi Nasional (BGN) telah ditutup.

Penutupan tersebut menandakan kuota mitra secara administratif telah terpenuhi. Meskipun menurut Mahila, di lapangan masih terdapat sejumlah SPPG yang belum rampung tahap

finalisasi sehingga belum dapat dioperasikan.

Lebih lanjut, dari total SPPG yang telah berdiri, disebutkannya sebanyak 159 unit sudah beroperasi dan melayani 341.156 penerima manfaat. Kelompok penerima mencakup pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita non PAUD atau kelompok 3B.

Jika dibandingkan dengan target 698.855 penerima manfaat, Mahila mengatakan masih terdapat 357.699 warga Kabupaten Malang yang belum menerima layanan MBG. Selisih tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi percepatan operasional SPPG.

"Secara kapasitas, masing-masing SPPG dirancang melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Namun pada tahap awal operasional, unit yang baru berjalan umumnya melayani 1.000 sampai 2.000 penerima terlebih dahulu sambil menyesuaikan kesiapan sumber daya," katanya.

Mahila menjelaskan, SPPG yang telah berdiri tidak serta-merta bisa langsung beroperasi. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus

dipenuhi, mulai dari penunjukan kepala SPPG, ketersediaan tenaga ahli gizi, akuntan, hingga relawan pendukung operasional.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah SPPG, diakuinya juga berpotensi meningkatkan permintaan bahan baku pangan. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu risiko inflasi apabila tidak dikelola secara tepat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris I Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Malang, ini menegaskan SPPG tidak diperkenankan membeli bahan baku dalam jumlah besar langsung di pasar.

"SPPG diarahkan untuk menyerap hasil produksi petani lokal dengan harga yang tetap mengikuti mekanisme pasar," katanya.

Selain itu, kebutuhan bahan pangan juga dapat dipenuhi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Untuk jenis tertentu seperti makanan kering yang belum tersedia di koperasi, SPPG diperbolehkan bekerja sama langsung dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. (Santi/Dya)

KODE KERAS KIM JONG UN SEBELUM KONGRES PARTAI: PAMER 50 PELUNCUR ROKET RAKSASA

Menjelang Kongres ke-9 Partai Buruh Korea, Korea Utara (Korut) memamerkan 50 peluncur roket multi-laras kaliber 600 milimeter yang disebut hampir setara rudal balistik dalam akurasi dan daya hancur. Dalam seremoni di Pyongyang yang berbarengan dengan proyek pembangunan baru di Distrik Hwasong, pemimpin negara itu menegaskan sistem bersenjata berteknologi AI tersebut disiapkan untuk “misi strategis” dan menjadi bagian dari percepatan modernisasi militer guna menghadapi ancaman eksternal, sekaligus menandai arah baru kebijakan pertahanan yang akan ditegaskan dalam kongres partai akhir Februari.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menampilkan sistem peluncur roket multi-laras berkaliber besar menjelang Kongres

KORUT MEMILIKI SALAH SATU MILITER TERBESAR DI DUNIA SECARA KUANTITAS

PERSONEL:

-Aktif: Sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta personel (peringkat ke-4 atau ke-5 dunia).
-Cadangan: Mencapai 560.000 hingga 600.000 personel.

KEKUATAN DARAT:

Memiliki lebih dari 4.300 - 5.800 tank dan 8.800 - 21.100 artileri. Pada 19 Februari 2026, Kim Jong Un baru saja meresmikan penempatan 50 kendaraan peluncur baru untuk rudal jarak pendek berkemampuan nuklir.

KEKUATAN UDARA:

Mengoperasikan sekitar 368 - 810 pesawat tempur (terbanyak ke-5 di dunia secara jumlah, namun secara teknologi dianggap usang dibandingkan Korea Selatan).

KEKUATAN LAUT:

Memiliki sekitar 70 kapal selam.

KEMAMPUAN NUKLIR DAN RUDAL (ASIMETRIS)

Aspek ini tidak dihitung dalam skor konvensional GFP tetapi menjadi kekuatan utama deterensi Korut:

-Hulu Ledak Nuklir: Diestimasi memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir siap pakai.

-Produksi: Laporan terbaru per Januari 2026 menyebutkan Korut mampu memproduksi material nuklir untuk 10-20 senjata tambahan per tahun.

-Uji Coba 2026: Korut telah melakukan peluncuran dua rudal balistik pertama mereka tahun ini pada awal Januari 2026.

PASUKAN SIBER:

Memiliki sekitar 6.800 - 7.000 peretas (hackers) untuk perang asimetris



Pemandangan upacara penyerahan 50 peluncur roket multi laras 600 mm.(KCNA)

ke-9 Partai Buruh Korea, sembari menegaskan bahwa forum politik tertinggi negara itu akan menetapkan arah baru kebijakan militer dan pembangunan nasional.

Mengutip laporan kantor berita

negara KCNA, Kamis (19/2/2026), Kim menghadiri upacara penyerahan 50 unit peluncur roket ganda kaliber 600 milimeter di Pyongyang. Sistem senjata tersebut dipersembahkan oleh para pekerja industri

Siap Temui Pimpinan Korut, PM Jepang Singgung Kasus Penculikan

menghasilkan hasil konkret.” Ia juga menegaskan komitmen untuk “mengerahkan segala cara yang memungkinkan,” mengingat sebagian besar orang tua korban kini telah berusia lanjut.

Dalam unggahan di platform X se usai pertemuan, Takaichi menyebut dirinya siap menghadapi Kim Jong Un secara langsung di tingkat pemimpin agar Jepang dan Korea Utara dapat membayangkan masa depan yang diwarnai perdamaian dan kemakmuran bersama.

Pertemuan itu berlangsung sehari setelah peringatan satu tahun wafatnya Akihiro Arimoto, ayah dari korban penculikan Keiko Arimoto. Kini, Sakie Yokota-ibu dari Megumi Yokota yang diculik hampir lima dekade lalu--menjadi satu-satunya orang tua korban yang masih hidup. Ketua asosiasi keluarga korban, Takuya Yokota, menilai momentum politik di Jepang membuka peluang bagi negosiasi yang lebih meyakinkan di mata Pyongyang.

Asosiasi keluarga sebelumnya menyatakan tidak akan menolak bantuan kemanusiaan, pelanggaran sanksi sepihak, maupun pembicaraan

normalisasi hubungan diplomatik, dengan syarat seluruh korban dipulangkan selama masih ada orang tua korban yang hidup.

Namun, mereka memperingatkan akan mendesak langkah lebih keras, termasuk penguatan sanksi, jika tidak ada pemulangan sebelum Sakie Yokota wafat.

Pemerintah Jepang juga menegaskan akan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat terkait isu ini. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan persoalan penculikan diharapkan menjadi agenda dalam pertemuan puncak Jepang-Amerika Serikat bulan depan.

Upaya dialog dengan Pyongyang bukan hal baru. Hingga kini, hanya dua pertemuan antara Perdana Menteri Jepang saat itu Junichiro Koizumi dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il pada awal 2000-an yang pernah terlaksana. Setelah pertemuan pertama, Korea Utara memulangkan lima dari 17 korban yang diakui Jepang. Delapan lainnya dilaporkan meninggal pada 2002, sementara nasib sisanya belum jelas. (jat,ist/dya)

persenjataan kepada Kongres Partai.

Seremoni berlangsung Rabu (18/2/2026) bersamaan dengan peletakan batu pertama proyek konstruksi baru di Distrik Hwasong, yang oleh otoritas setempat dipandang sebagai simbol integrasi pembangunan ekonomi dan penguatan pertahanan.

Dalam pidatonya, Kim memberikan penilaian tinggi terhadap sistem tersebut. Ia menyatakan peluncur roket itu “hampir tidak dapat dibedakan dari rudal balistik presisi tinggi dalam hal akurasi dan kekuatan.”

Ia menambahkan bahwa sistem tersebut “cocok untuk serangan khusus, yaitu untuk melaksanakan misi strategis,” serta terintegrasi dengan “teknologi AI dan sistem panduan hibrida.” Pernyataan mengenai “misi strategis” oleh sejumlah pengamat internasional ditafsirkan sebagai indikasi kemampuan untuk membawa muatan nuklir.

Kim menegaskan bahwa Kongres ke-9 Partai Buruh Korea akan menjadi momentum penetapan arah baru pertahanan negara. “Kongres Kesembilan Partai kita akan mendeklarasikan fase berikutnya dari inisiatif dan tujuan pertahanan mandiri kita,” ujarnya. Ia juga menyatakan, “proyek untuk terus memperbarui kemampuan militer kita yang dapat dengan kuat menundukkan setiap ancaman dan tantangan dari kekuatan luar akan dipercepat.”

Kongres Partai Buruh Korea dipandang sebagai forum politik paling penting di negara tersebut. Agenda utamanya meliputi peninjauan capaian nasional, penetapan tujuan kebijakan baru di bidang pertahanan, ekonomi, dan diplomasi, serta kemungkinan perubahan kepemimpinan. Sejumlah analis memperkirakan kongres dapat dimulai pada akhir pekan ini.

Otoritas militer Korea Selatan (Korsel) menyatakan terus memantau perkembangan tersebut. Seorang juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pihaknya mengamati dengan cermat aktivitas pengembangan senjata Korea Utara. (wid,cna,ist/dya)

PERDANA Menteri Jepang Sanae Takaichi kembali menegaskan kesiapannya bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un guna menuntaskan isu penculikan warga Jepang pada dekade 1970-1980-an. Pernyataan itu disampaikan saat ia menerima keluarga korban di kediaman resminya pada 16 Februari.

Mengutip laporan The Japan Times, Kamis (29/2/2026) Takaichi menyatakan keinginannya untuk “mencapai terobosan dan

Awas! Galon Tua Melarutkan Zat Kimia Berbahaya



Di pasaran Galon guna ulang berusia tua (ganula) masih banyak ditemukan. Ganula berisiko melarutkan zat kimia berbahaya Bisfenol A (BPA) ke dalam air yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

David Tobing sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyatakan, berdasarkan investigasi, lebih dari separuh (57 persen) galon yang beredar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sudah memasuki usia dua tahun. Usia pemakaian galon yang wajar dan aman menurut para ahli adalah satu tahun.

Pofesor Mohammad Chailid seorang ahli polimer dari Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa galon isi ulang memiliki batas usia pemakaian, yaitu 40 kali pengisian ulang. "Itu artinya tidak sampai setahun. Ini batas amannya," ujar Chailid.

Chailid menerangkan kembali, penggunaan dan pencucian yang

berulang akan merusak struktur kimia plastik. Kerusakan tersebut menyebabkan molekul BPA terlepas dan larut ke dalam air minum.

Kemudian David kembali menjelaskan, investigasi KKI menemukan fakta yang sangat menakutkan, yaitu delapan dari sepuluh galon yang dijual di pasaran sudah kusam dan sudah tidak layak pakai.

Penampilan yang tak layak tersebut menjadi tanda visual bahwa kemasan galon yang rusak akan berisiko tinggi melepaskan zat kimia berbahaya BPA. Penemuan ini, imbuhan lainnya lagi, juga menguatkan dugaan bahwa pengawasan terhadap kualitas galon air minum isi ulang masih lemah.

"Dari investigasi kami di 60 kios di Jabodetabek, 57 persen galon yang beredar berusia di atas dua tahun. Bahkan, kami menemukan galon produksi 2012. Temuan ini menunjukkan ada masalah sistemik

dalam pengawasan dan kenaikan produk air minum dalam kemasan," ujar David.

Seperti yang sudah diketahui, risiko kesehatan dari paparan BPA dalam jangka panjang tidak bisa dianggap remeh.

Berbagai studi ilmiah telah mengaitkan BPA dengan gangguan kesuburan, masalah metabolisme seperti obesitas dan diabetes, gangguan perkembangan otak pada janin, hingga peningkatan risiko kanker payudara dan prostat.

Desak Produsen Bertanggung Jawab

Menanggapi kasus ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak para produsen untuk bertanggung jawab.

Fita Bukhari anggota BPKN meminta agar para produsen untuk segera mengambil tindakan tanpa harus menunggu paksaan dari hukum.

"Kami meminta produsen untuk

bertindak baik supaya galon-galon yang sudah lama, yang sudah berusia lanjut itu, dapat ditarik kembali," ujar Fitrah.

Menurut Fitrah, hal ini merupakan seruan moral, walaupun secara hukum masih diberlakukan beberapa tahun lagi.

Meski secara moral, produsen mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan, apalagi air minum ini termasuk hajat hidup.

"BPKN berencana menindaklanjuti laporan (temuan KKI) ini dengan melakukan penelitian independen.

Sementara itu, konsumen diimbau lebih proaktif melindungi diri dengan memeriksa kondisi fisik dan kode produksi galon sebelum membeli, serta berani menolak produk galon air minum yang sudah tua dan tidak layak pakai," ujar Fitrah. (Masykurotul_mahasiswa UINSA yang berkontribusi dalam tulisan ini).

Tips Mengenali Galon Isi Ulang yang Sudah Lama

Perhatikan umur pemakaian galon

Galon isi ulang (terutama yang terbuat dari plastik polikarbonat/BPA) biasanya direkomendasikan tidak digunakan lebih dari sekitar 40 kali isi ulang atau sekitar 1 tahun pemakaian. Jika sudah lebih lama dari itu, risiko plastiknya mengalami kerusakan mikro meningkat.

Cek tanda fisik luar galon

- Permukaan plastik sudah kusam, berwarna kekuangan, atau terlihat buram
- Ada goresan, lecet, atau retak pada badan galon
- Tutup galon tidak lagi rapat

Amati bau atau rasa air di dalam galon

Air galon seharusnya bening, tidak berbau, dan tanpa rasa. Jika tercium atau terasa plastik, galon kemungkinan sudah tua atau tidak higienis sehingga kualitas air menurun.

Perhatikan kebersihan dan cara penyimpanan

Galon yang kotor atau sering terkena panas mempercepat kerusakan plastik dan memicu pelepasan bahan kimia ke air. Simpan galon di tempat sejuk dan terlindung dari panas.



Jaga Perbatasan Vietnam, China Uji Coba Robot Humanoid Walker S2

Pemerintah China mulai menjalankan uji coba pemanfaatan robot humanoid untuk membantu aktivitas operasional di kawasan perbatasan Fangchenggang, wilayah selatan Guangxi yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Hal ini bertujuan untuk menguji ketangguhan teknologi robotika di ruang public yang kompleks dan dinamis.

Langkah tersebut bukan sekadar ajang pameran teknologi, melainkan bagian dari agenda nasional untuk memasukkan robot humanoid ke dalam sistem operasional di area publik yang berisiko tinggi. Fangchenggang dipilih karena tempat tersebut merupakan tempat masuk utama lalu lintas internasional, dengan arus kargo dan penumpang lintas negara yang padat dan berkelanjutan. Proyek ini dipercayakan kepada

UBTECH Robotics Corp., perusahaan teknologi robot asal Shenzhen, yang memperoleh kontrak senilai sekitar 37 juta dolar AS.

Pemilihan kawasan perbatasan sebagai lokasi uji coba didasarkan pada kompleksitas lingkungannya. Jika robot mampu bekerja stabil dalam lingkungan padat dan ritme logistik cepat, maka teknologi ini dianggap layak diterapkan di fasilitas vital lain, seperti bandara maupun pelabuhan internasional.

Walker S2 dikembangkan dengan pendekatan embodied intelligence, yaitu konsep kecerdasan buatan yang menyatu langsung dengan struktur fisik robot sehingga mampu merespons dunia nyata. Robot ini memiliki postur menyerupai manusia dewasa, dilengkapi kaki berengsel dan dua lengan multifungsi untuk menunjang mobilitas dan interaksi.

Untuk menunjang kinerjanya, Walker S2 dibekali berbagai sistem canggih, mulai dari kamera dan sensor kedalaman untuk navigasi real-time, sensor gaya pada persendian guna menjaga keseimbangan di permukaan licin, hingga mekanisme penggantian baterai otomatis tanpa intervensi manusia. Robot ini juga mampu mendeteksi kerumunan dan menghindari tabrakan secara mandiri.

Dalam praktiknya, robot humanoid ini berfungsi sebagai asisten petugas perbatasan. Mereka membantu mengatur antrean, memberikan informasi dasar kepada pendatang, serta memastikan jalur evakuasi di ruang tunggu tetap bebas hambatan. Di sektor logistik, Walker S2 turut dilibatkan dalam pemeriksaan kontainer kargo,

mulai dari verifikasi identitas, pengecekan segel keamanan, hingga pengiriman data status secara otomatis ke pusat kendali otoritas setempat.

Program ini sejalan dengan arahan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China yang menargetkan terbentuknya sistem inovasi nasional robot humanoid pada 2025. Pemerintah China kini menempatkan industri robotika sebagai sektor strategis, setara dengan pengembangan semikonduktor.

Meski demikian, di balik lonjakan pesanan seri Walker S2 yang dilaporkan mencapai 157 miliar dolar AS sepanjang 2025, UBTECH masih menghadapi tantangan besar dalam mengonversi pertumbuhan tersebut menjadi keuntungan jangka panjang. Pengawasan gelembung teknologi memengaruhi keberlanjutan bisnis. (Inna - Mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Tips Make Up Anti-Crack dan Tetap Flawless Seharian

Make up yang “crack” atau pecah-pecah sering bikin tampilan wajah terlihat kering dan kurang halus, padahal riasan sudah diaplikasikan dengan niat maksimal.

Biasanya ini terjadi karena kulit kurang terhidrasi, teknik layering terlalu tebal, atau produk tidak cocok dengan kondisi kulit. Untuk mengatasinya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan.

Lembapkan kulit sebelum make up

Langkah awal yang tidak kalah penting sebelum merias wajah adalah memastikan kulit berada dalam kondisi lembap. Kulit yang kering cenderung membuat foundation sulit menempel dengan sempurna, sehingga hasil riasan terlihat tidak rata dan mudah retak.

Gunakan pelembap yang sesuai dengan jenis kulit, lalu tunggu beberapa menit agar produk menyerap dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap make up. Bila diperlukan, aplikasikan juga primer yang bersifat menghidrasi untuk memberikan dasar ekstra agar riasan lebih halus.

Selain menjaga kelembapan, kebersihan kulit juga perlu diperhatikan. Memastikan wajah bebas dari minyak dan kotoran dengan membersihkannya terlebih dahulu, kemudian gunakan toner sebelum pelembap. Langkah ini dapat membantu make up menempel lebih optimal.

Dengan begitu, jangan melewati rangkaian perawatan kulit sebelum

make up. Tahapan inilah yang menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil riasan yang tahan lama dan bebas crack.

Pilih primer yang sesuai

Primer menjadi salah satu kunci penting dalam tips make up anti crack. Bukan hanya berfungsi agar riasan lebih tahan lama, primer juga membantu menghaluskan permukaan kulit serta mengontrol minyak berlebih.

Agar hasilnya optimal, pemilihan primer perlu disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Mattifying primer cocok digunakan untuk kulit berminyak, sementara pore-filling primer dapat membantu menyamarkan tampilan pori-pori yang besar.

Penggunaan primer sebaiknya tidak berlebihan. Cukup aplikasikan secukupnya dan ratakan dengan lembut agar make up tidak menggumpal. Fokuskan pemakaian pada area yang rentan mengalami crack, seperti bawah mata, dahi, dan sekitar mulut.

Dengan primer yang tepat, foundation akan lebih mudah menyatu dengan kulit, sehingga tampilan make up terlihat lebih halus dan tahan sepanjang hari.

Aplikasikan foundation dan concealer dengan benar

Cara mengaplikasikan foundation sangat memengaruhi hasil akhir make up. Karena itu, hindari langsung mengoleskan foundation dalam jumlah banyak sekaligus.

Sebaiknya, bangun tingkat coverage secara bertahap dengan menggunakan produk secukupnya. Untuk hasil yang lebih halus dan natural, aplikasikan foundation menggunakan beauty sponge yang lembap atau kuas dengan kualitas baik.

Setelah foundation, concealer bisa digunakan seperlunya dengan cara membubuhkan titik-titik kecil di area bawah mata, jerawat, atau noda pada kulit. Pastikan untuk menekan produk ke kulit secara perlahan, bukan menggesernya.

Teknik ini membantu make up menempel lebih baik dan mengurangi risiko crack. Penggunaan foundation dan concealer yang terlalu tebal justru membuat riasan lebih mudah retak. Karena itu, fokuslah pada hasil akhir yang ringan, halus, dan merata.

Gunakan setting powder dan setting spray

Setelah foundation dan concealer diaplikasikan, langkah selanjutnya adalah mengunci make up dengan setting powder. Tahapan ini penting agar riasan lebih tahan lama dan tidak mudah bergeser.

Pilih bedak tabur dengan tekstur ringan agar tidak menumpuk di permukaan kulit. Aplikasikan secukupnya, terutama pada area yang cenderung berminyak, seperti T-zone dan area bawah mata. Untuk hasil yang lebih segar, lanjutkan dengan menyemprotkan setting spray. Produk ini membantu menambah kelembapan sekaligus membuat setiap lapisan make up menyatu dengan lebih baik.

Selain itu, setting spray juga dapat mengurangi tampilan bedak yang terlihat terlalu berdebu, sehingga hasil akhir make up tampak lebih natural dan bercahaya.

Rutin membersihkan alat make up

Tips make up agar tidak crack yang satu ini sering kali terlupakan, yaitu menjaga kebersihan alat make up. Kuas dan spons yang jarang dibersihkan dapat dipenuhi sisa produk, sehingga tidak mampu meratakan foundation dengan optimal di kulit. Selain membuat hasil riasan tampak cakey, alat make up yang kotor juga berisiko memindahkan bakteri ke kulit. Kondisi ini dapat membuat kulit terlihat kusam dan mengganggu proses

regenerasi alami kulit. Oleh karena itu, pastikan untuk rutin mencuci alat make up setidaknya setiap dua minggu sekali menggunakan air hangat dan sabun. Bersihkan lebih sering apabila sudah terlihat penumpukan produk agar hasil make up tetap halus dan sehat.

Tampil dengan make up yang flawless dari pagi hingga malam tentu menjadi impian banyak orang. Untuk mewujudkannya, pahami tips make up agar tidak crack menjadi hal yang penting.

Dengan teknik dan produk yang tepat, tampilan wajah akan terlihat lebih segar, tidak kusam, dan riasan pun bertahan lebih lama.

Perlu diketahui, make up yang mudah crack bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi kulit yang kurang terhidrasi, pemilihan produk yang tidak sesuai, hingga teknik aplikasi yang kurang tepat. Dengan menerapkan lima tips yang telah dibahas, make up anti crack bukan lagi sekadar harapan, melainkan hasil nyata yang bisa kamu rasakan sehari-hari. (Ella- mahasiswa UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini).

Catatan Tambahan Make Up Anticrack

Minum Cukup Air

Kulit yang terhidrasi dari dalam bikin make up jadi lebih nempel.

Jangan Skip Sunscreen

Pilih sunscreen yang ringan dan cepat menyerap.

Hindari Terlalu Banyak Layer

Gunakan foundation atau base make up secukupnya.

Touch-Up dengan Mist

Kalau wajah mulai terasa kering, semprot facial mist sebelum re-apply bedak.

Beri Jeda Waktu

Tunggu 5-10 menit agar produk meresap sempurna sebelum ke tahap berikutnya.

Kini BPJS Kesehatan ...dari hal 1

Presiden Prabowo Subianto menetapkan jajaran baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan, berlaku efektif mulai 19 Februari 2026.

Di pucuk pimpinan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito ditetapkan sebagai Direktur Utama, menggantikan Ali Ghufron Mukti yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2026. Pergantian ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta menjaga kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyatakan, “Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).”

Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Aturan tersebut menetapkan masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode berikutnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi IX telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Pengawas yang diajukan Presiden, sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 terdiri atas Stevanus Adrianto Passat sebagai Ketua dari unsur pekerja, Murti Utami Adyanto dan Rukijo dari unsur pemerintah, Afif Johan dari unsur pekerja, Paulus Agung Pambudhi dan Sunarto dari unsur pemberi kerja, serta Lula Kamal dari unsur tokoh masyarakat.

Sementara itu, jajaran Direksi terdiri atas Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama, bersama Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianti Permanasari, dan Sutopo Patria Jati sebagai direktur.

Menurut Rizzky, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, termasuk kebijakan dan kinerja Direksi, pengelolaan serta pengembangan Dana Jaminan Sosial, pemberian saran dan

pertimbangan kepada Direksi, serta penyampaian laporan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Dewan Pengawas juga berwenang menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, meminta laporan Direksi, mengakses data penyelenggaraan BPJS, serta memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Ia menambahkan, “Direksi berfungsi melaksanakan operasional BPJS guna menjamin peserta memperoleh manfaat sesuai haknya. Direksi bertugas mengelola BPJS mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, serta memastikan Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsinya.”

Jejak Karir Dirut

Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan latar belakang militer serta pengalaman panjang di bidang pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Ia lahir di Solo pada 29 Maret 1967 dan menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, lulus pada 1994.

Pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah diselesaikan-

nya di Universitas Airlangga pada 2007. Ia kemudian meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit pada 2015 serta Doktor Hukum Kesehatan pada 2021.

Karier militernya dimulai melalui jalur perwira karier pada 1990. Selama satu dekade pertama, ia bertugas sebagai dokter di Komando Pasukan Khusus. Setelah itu, ia berkarier di sejumlah fasilitas kesehatan militer, antara lain sebagai Kepala Departemen Jantung di RS Dustira Cimahi dan RSPAD Gatot Soebroto.

Ia kemudian menjabat Direktur Pengawasan Medik RSPAD Gatot Soebroto pada periode 2021–2023.

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati menjabat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan periode 2023–2025 dan memasuki masa purna tugas militer pada Februari 2025.

Proses Seleksi Digugat ke PTUN

Diketahui, proses seleksi sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Januari 2026 oleh tiga pihak yang meminta penundaan serta pengulangan seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Para penggugat menilai terdapat kekeliruan dalam tahapan seleksi

dan mendesak proses diperbaiki hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, panel tetap melanjutkan tahapan seleksi. Hingga kini perkara tersebut masih berproses di PTUN dan belum ada putusan final.

Sidang perdana telah digelar pada Selasa, 13 Januari 2026, di PTUN Jakarta. Penggugat menilai panel tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan tahapan seleksi.

Di tengah polemik itu, DPR telah menetapkan lima anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 melalui rapat paripurna. Sementara susunan direksi dijadwalkan diumumkan setelah keputusan presiden.

Pada saat yang sama, tantangan utama lembaga ini masih berkisar pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Hingga Februari 2026, total peserta mencapai 284,5 juta jiwa, namun sekitar 63,4 juta tercatat tidak aktif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai lonjakan peserta nonaktif berkaitan dengan wacana penghapusan tunggakan iuran yang memicu moral hazard. Pemerintah juga mencatat lebih dari separuh penduduk telah menerima subsidi iuran JKN melalui APBN maupun APBD dengan skema subsidi penuh dan sebagian. (kum, ini, ant, tin, dya)

Foto Rumah dan Token Listrik Jadi Tiket Verifikasi PBI-JKN

PEMERINTAH mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) pada Februari hingga April 2026. Peserta diminta bersikap kooperatif serta menyiapkan dokumen pendukung, antara lain foto kondisi rumah dan bukti penggunaan listrik seperti token.

Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan iuran benar-benar tepat sasaran. Ia meminta masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi riil.

Proses ground check melibatkan sekitar 60 ribu petugas dari BPS,

Kementerian Sosial, dan dinas sosial daerah. Pemerintah mencatat jumlah penerima PBI-JKN saat ini sekitar 152 juta jiwa atau 52 persen populasi. Sekitar 100 juta peserta dibiayai APBN dan 50 juta lainnya oleh pemerintah daerah.

“Silakan berikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar penyaluran bantuan pemerintah, khususnya PBI-JKN, dapat tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Namun, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) 2025, lebih dari 54 juta warga pada kelompok desil 1 hingga 5 belum menerima PBI-JKN. Sebaliknya, lebih dari 15 juta warga di desil 6 hingga 10 dan non-desil masih tercatat sebagai penerima. Selain itu, lebih dari 11 juta peserta PBI-JKN saat ini berstatus nonaktif dan akan diverifikasi ulang kelayakannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan foto rumah dan bukti token listrik menjadi rujukan utama dalam menilai tingkat kesejahteraan terbaru peserta. Dokumen tersebut wajib diunggah melalui aplikasi yang disediakan Kementerian Sosial, terutama bagi masyarakat yang mengajukan usulan, sanggahan, maupun reaktivasi kepesertaan.

Pemerintah membuka kanal partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang telah terintegrasi dengan DTSN, serta layanan pengaduan melalui call center dan WhatsApp resmi. Verifikasi ini ditujukan untuk memastikan bantuan iuran JKN tepat menasar warga miskin dan rentan miskin, sekaligus mencegah peserta yang tak lagi memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima. (wid, ist, kum, dya)



DPRD Surabaya Dukung Penertiban Tiang Fiber Optik Ilegal

BAHTIYAR RIFAI TEKANKAN PENTINGNYA VERIFIKASI



Penertiban FO ilegal dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya di sejumlah ruas jalan Sabtu (14/2/2026). (dok.kominfosby)

SURABAYA– Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) yang kembali menertibkan puluhan tiang kabel fiber optik (FO) tak berizin atau ilegal.

Menurut Bahtiyar, langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Ia mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya dalam menata jaringan utilitas demi memperindah wajah kota. “Ini kegiatan rutin untuk menegakkan Perda. Kami di DPRD tentu sangat mendukung langkah-langkah Pemkot melalui Satpol PP dan DSDABM untuk memperindah setiap sudut Kota Surabaya,” kata Bahtiyar, Kamis (19/2/2026).

Meski demikian, politisi Gerindra ini mengingatkan agar setiap tindakan pembongkaran tetap melalui tahapan administrasi yang jelas. Ia berharap sebelum dilakukan penertiban, pemilik tiang atau kabel terlebih dahulu diverifikasi dan diberikan surat peringatan secara bertahap.

“Alangkah baiknya dilakukan verifikasi dulu, dicari siapa pemiliknya, lalu disurati. Berikan peringatan satu, dua, sampai tiga. Kalau tidak ada respons, baru dilakukan tindakan sesuai ketentuan

yang berlaku,” tegasnya.

Ia menilai, pendekatan administratif penting agar penegakan aturan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ingatkan Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Di sisi lain, Bahtiyar juga mengingatkan para pelaku usaha penyedia jaringan utilitas agar mematuhi aturan perizinan sebelum melakukan pemasangan kabel maupun tiang di ruang milik jalan.

Kepatuhan administrasi, menurutnya, merupakan syarat awal yang selalu diperiksa ketika ditemukan dugaan pelanggaran.

“Sebelum memasang kabel atau tiang, sebaiknya mengurus perizinan terlebih dahulu ke pemerintah kota. Administrasinya harus lengkap supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.

Sebelumnya, penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya di sejumlah ruas jalan Sabtu (14/2/2026).

Dalam kegiatan ini, petugas menyoroti tiga lokasi, yakni Jalan Ngaglik, Jalan Kapas Krampung sisi selatan, serta Jalan Kapas Krampung sisi utara.

Penertiban tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang

sebelumnya telah dilaksanakan pada Sabtu (7/2/2026), Selasa (10/2/2026), dan Rabu (11/2/2026). Langkah ini dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menata jaringan utilitas agar lebih tertib dan aman.

Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Agnis Juistiyas, mengatakandalam kegiatan tersebut pihaknya berhasil mengamankan total 45 tiang kabel fiber optik dari ketiga titik lokasi.

“Di Jalan Ngaglik kami mengamankan 10 tiang, di Jalan Kapas Krampung sisi selatan 19 tiang, dan di sisi utara sebanyak 16 tiang. Jadi total ada 45 tiang yang berhasil kami tertibkan,” ujar Agnis.

Ia menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, tiang-tiang yang melanggar terlebih dahulu diberi penanda berupa stiker pelanggaran oleh tim dari DSDABM. “Penandaan ini bertujuan untuk mempermudah petugas di lapangan saat proses penertiban, sehingga lebih efektif dan terarah,” jelasnya.

Selain menertibkan tiang, petugas juga melakukan penindakan terhadap sejumlah kabel fiber optik yang tidak sesuai ketentuan. Kabel-kabel tersebut kemudian dirapikan untuk menghindari kesan semrawut di ruang publik.

“Kami juga menertibkan beberapa

kabel yang melanggar, lalu dilanjutkan dengan perapihan agar kabel udara bisa tertata lebih rapi dan tidak mengganggu estetika kota,” tambahnya.

Agnis menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

“Penindakan ini kami lakukan sebagai bentuk penegakan perda. Harapannya, seluruh penyedia layanan telekomunikasi dapat lebih patuh terhadap ketentuan perizinan yang berlaku,” tegasnya.

Agnis menambahkan, penertiban serupa akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan lain yang telah dipetakan sebelumnya.

“Rencananya penertiban akan berlangsung hingga minggu kedua Maret. Kami sudah memplot beberapa ruas jalan yang akan ditertibkan bersama DSDABM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan (Dishub),” pungkasnya. (adv/ama/dya)



Sebelum memasang kabel atau tiang, sebaiknya mengurus perizinan terlebih dahulu ke pemerintah kota. Administrasinya harus lengkap supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.”

BAHTIYAR RIFAI

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya,